

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN PERAHU PAYANG UNTUK
PARA NELAYAN OLEH DINAS PERIKANAN KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar S.AP*



OLEH :

WIDIA RAHMA

17042267

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Kebijakan Bantuan Perahu Payang Untuk
Para Nelayan Oleh Dinas Perikanan Kota Padang

Nama : Widia Rahma

NIM/TM : 17042267/ 2017

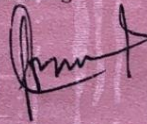
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2021

Disetujui oleh,
Pembimbing



Dra. Fitri Erivanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat 13 Agustus 2021 Pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB

Efektivitas Kebijakan Bantuan Perahu Payang Untuk Para Nelayan Oleh Dinas Perikanan Kota Padang

Nama : Widia Rahma
NIM/TM : 17042267/ 2017
Program Studi : Ilmu /Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2021

Tim Penguji

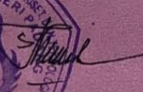
Nama
Ketua : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
Anggota : Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si
Anggota : Dr. Zikri Alfadi, S.IP., MA

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Dr. Sri Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Rahma
NIM/TM : 17042267/2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Efektivitas Kebijakan Bantuan Perahu Payang Untuk Para Nelayan Oleh Dinas Perikanan Kota Padang"** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Widia Rahma

2017/17042267

ABSTRAK

WIDIA RAHMA
17042267/2017

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN PERAHU PAYANG UNTUK PARA NELAYAN OLEH DINAS PERIKANAN KOTA PADANG

Artikel ini bertolak dari permasalahan yang diteliti tentang bantuan yang diterima selama ini oleh Dinas Perikanan Kota Padang sebagian mungkin bisa meningkatkan pendapatan nelayan, terkadang bantuan juga tidak bisa dioperasikan oleh nelayan contohnya saja perahu payang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Padang khususnya di Kecamatan Koto Tangah dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengujian validitas data dengan triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang belum dapat dikatakan efektif karena setelah diukur menggunakan teori Nugroho (2012:107), hal terkait indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan belum terpenuhi.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan terdapat masalah pada 3 indikator utama yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, dan Sikap Pelaksana. Pada indikator Struktur Birokrasi tidak ada masalah karena tidak adanya fragmentasi organisasi yang dapat menghambat koordinasi dan tujuan kepentingan pribadi atau instansi juga tidak ada yang mana hal tersebut dapat menghambat keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Kemudian pada tiga indikator lainnya memang terdapat masalah karena pada sumber utama masalahnya ada pada sumberdaya yang masih kurang, tidak memadai, dan sikap pelaksana yang tidak berkelanjutan setelah bantuan diberikan menyebabkan keluhan nelayan tidak diterima, dan tidak adanya komunikasi yang jelas antara Dinas Perikanan dengan nelayan menyebabkan bantuan tidak layak pakai melaut.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Bantuan Perahu Payang, Dinas Perikanan Kota Padang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Bantuan Perahu Payang Untuk Para Nelayan Oleh Dinas Perikanan Kota Padang”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP. MA dan Bapak Rahmadani Yusran, S.sos. M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Ma'ani, M.Si selaku dosen pembimbing akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Staf karyawan/karyawati kepastakaan dan staf administrasi jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Seluruh staf Dinas Perikanan Kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
9. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Melwani dan Ibunda tersayang Etmidalti yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Tersayang kepada Kakak dan Adik-adik keluarga yaitu Shintia Melina, Dwi Noviyani, dan Riski Wahyudi yang penulis cintai dan sayangi yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
11. Terima kasih kepada grup Covid Kak Sifa dan Kak Rista yang selalu baik memberi pengarahan dan nasihat kepada saya, bg Putra yang selalu mensupport dan menemani penelitian saya, bg Afzal, bg Ari, dan bg ade yang selalu berbaik hati siap membantu, dan selaku teman-teman yang seperjuangan dengan saya dalam menyelesaikan skripsi ini beserta

kawan-kawan yang berada pada penelitian payung yang sama yang saling menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 16 Juni 2021

Penulis

Widia Rahma

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Efektivitas Kebijakan	11
2. Indikator Efektivitas Kebijakan	15
3. Evaluasi Kebijakan	20
4. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Kebijakan	22
5. Pengertian Perahu Payang	26
6. Kegunaan dan Fungsi Nelayan Perahu Payang	27
7. Spesifikasi Perahu Payang	28
8. Peran Dinas Perikanan Dalam Penyaluran Bantuan Perahu Payang	31
B. Penelitian yang Relevan	33
C. Kerangka Konseptual	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	41
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
a. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus.....	52
C. Pembahasan.....	70
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kelompok KUB Penerima Bantuan Perahu Payang	5
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rancangan umum Perahu Payang	29
Gambar 2.2 Rencana Garis Perahu Payang.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DKP Kota Padang	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut adalah wilayah perairan yang memenuhi 2/3 bagian dari Bumi yang berisi oleh air (Wisudo, 2014: 1.7). Laut mempunyai keragaman manfaat bagi manusia baik dari segi pemanfaatan untuk penggunaan jalur perdagangan, jalur transportasi, hingga pemanfaatan sebagai industri dan laut juga merupakan sumber kehidupan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia sebagian besar adalah lautan, sehingga Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan sangat erat kaitannya dengan perikanan skala kecil, terutama di negara-negara berkembang. Perikanan skala kecil memberikan kontribusi penting bagi pengentasan kemiskinan dan penghidupan nelayan yang berkelanjutan. Potensi laut yang sangat besar ini tentunya dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat. Potensi laut yang sangat besar ini tentunya dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat. Namun kekayaan sumber daya laut tersebut belum dikelola dengan baik (Kusnadi, 2009:1). Seandainya potensi ini dikelola dengan baik, maka dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan sektor perikanan terutama nelayan (Wicaksono & Fahmi, 2021:110).

Menurut Undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang pekerjaan pokoknya melakukan penangkapan ikan. Nelayan dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu nelayan kecil dan nelayan besar. Nelayan kecil yaitu orang yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari menggunakan alat tangkap tradisional, sedangkan nelayan besar menangkap ikan menggunakan teknologi yang canggih. Nelayan dalam pengertian luas terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, dan supplier faktor sarana produksi perikanan.

Umumnya nelayan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Kriteria pada nelayan tradisional itu sendiri yaitu masih menggunakan alat tangkap yang tradisional, memiliki modal usaha yang masih sedikit dan organisasi penangkapan yang relatif lebih sederhana. Pada kriteria negara modern, nelayan mampu merespon perubahan dan wilayah Indonesia yang merupakan kawasan perairan lebih tangkap yang dihadapi oleh nelayan. Perbedaan pada nelayan tampak jelas dilihat pada keterbatasan penggunaan teknologi, keterbatasan ruang gerak bagian pantai yakni bagian tepi pantai dan bagian tengah lautan (Kusnadi, dalam Hidayat, 2018:32).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di pulau Sumatera. Kegiatan melaut dilakukan disepanjang pantai yaitu pantai Pesisir Selatan, Bungus, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam dan daerah Pesisir Pasaman. Di kota Padang ada 5 kecamatan yang berbatasan langsung dengan garis

pantai yaitu kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Utara, dan Kecamatan Koto Tangah.

Pada pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya ikan dan Petambak Garam, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam salah satunya bertujuan untuk: a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya kelautan harus diintegrasikan dengan ekonomi lainnya, yaitu bagaimana Peran Pemerintah mendorong masyarakat nelayan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Padang dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan, berdasarkan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2019, Pihak Dinas memberikan bantuan kepada kelompok nelayan berupa pengadaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap, yaitu bantuan berupa perahu sampan, mesin longtail 6,5 PK dan 9 PK, life jacket, mesin tempel 15 PK dan 40 PK, fishbox fiber kapasitas 75 dan 100 liter, Perahu Fiber, Dan Perahu Payang. Adapun objek yang peneliti pilih adalah bantuan Perahu Payang pada kelompok nelayan di Kecamatan Padang Utara dan Koto Tangah.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 3/Per-Djpt/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017, tujuan bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pemberian bantuan perahu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan;
- b. Meningkatkan jumlah perahu perikanan yang berkualitas;
- c. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan;
- d. Meningkatkan mutu hasil tangkapan; dan
- e. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat nelayan.

Adapun Kelompok KUB penerima bantuan Perahu Payang di Kota Padang terdiri dari 4 kelompok dengan 4 bantuan perahu yang terdiri dari masing-masing 1 unit bantuan Perahu Payang.

Tabel 1.1

Data Kelompok KUB Penerima Bantuan Perahu Payang di Kota Padang

No.	Nama KUB	Nama Ketua	Alamat	Tahun Penerimaan
1.	Batang Muaro	Rojali	Kel. Ulak Karang, Kec. Padang Utara	2018
2.	Ombak Bahari Ulak Karang (Ombarang)	Hendra Budiman	Kel. Ulak Karang, Kec. Padang Utara	2019
3.	Kelompok Nelayan Karang Permai (KNKP)	Ali Amran	Kel. Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara	2019
4.	Laut Biru Muaro Gantiang	Syafriadi	Kel. Parupuak Tabing, Kec. Koto Tengah	2019

Sumber: Data Tabel KUB SIMREKOM-KP Pemerintah Kota Padang Dinas Kelautan Dan Perikanan

Bantuan tersebut disalurkan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdaftar di Dinas Perikanan Kota Padang yang telah menyampaikan proposal permohonan bantuan Perahu Payang. Namun bantuan Perahu Payang tersebut tidak efektif dikarenakan pemberian bantuan perahu yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Padang kepada para nelayan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan nelayan. Salah satu KUB yang mengatakan perahu tersebut adalah KUB nelayan dari Kelurahan Parupuak Tabing Kecamatan Koto Tengah sehingga bantuan perahu yang diberikan terbengkalai atau tergeletak begitu saja di tepian pantai. Oleh karena itu salah satu KUB nelayan berinisiatif untuk mengelola dan memanfaatkan perahu tersebut karena mereka tidak mempunyai perahu. KUB nelayan yang mengelola dan memanfaatkan perahu tersebut adalah KUB Sarumpun yang berasal dari kelurahan dan kecamatan yang sama.

Perahu tersebut dikatakan nelayan tidak efektif dan tidak layak pakai dikarenakan desain dan spesifikasi perahu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

nelayan. Desain perahu yang diberikan seperti boat. Contohnya di bagian lambung perahu (*Hull*) yang berfungsi memberikan gaya apung dan merupakan bagian dasar dari perahu berbentuk datar sedangkan Perahu Payang yang sering digunakan nelayan bagian lambung belakang perahunya berbentuk cembung dan sisi kiri kanan lambung lebih lebar yang berfungsi sebagai penyeimbang agar tidak oleng saat digunakan ketika menarik payang di tengah laut. Perahu bantuan yang diberikan tidak mempunyai penyeimbang ini sehingga jika digunakan melaut akan oleng dan membahayakan nelayan apalagi diterpa badai. Ukuran perahu yang diberikan lebih besar dari yang biasa digunakan nelayan bahkan harus digerakkan dengan menggunakan 2 mesin tempel yang berakibat semakin borosnya bahan bakar. Jika hanya menggunakan satu mesin perahu tidak bisa bergerak jauh dan leluasa menangkap ikan. Serta harus bersaing juga dengan kelompok nelayan lain yang menangkap ikan di perairan yang sama dan tentunya ini menjadi perebutan ikan. Ikan yang didapat pun menjadi terbatas.

Pengawasan dan pendampingan yang kurang dalam pembuatan perahu membuat perahu berbeda dengan yang diinginkan oleh nelayan. Pembuatan perahu tersebut juga tidak dihadiri dan dirundingkan bersama dengan nelayan pada saat pemilihan bahannya sehingga perahu lebih berbentuk kepada desain boat bukan berbentuk Perahu Payang. Ini menyebabkan perahu menjadi tidak efektif dan tidak layak pakai untuk nelayan. Keadaan perahu tidak layak pakai dikarenakan kayu rapuh dan berpotensi tenggelam jika dipaksakan digunakan. Karena musim hujan, maka kayu itu basah dan saat musim panas kayunya merenggang. Contohnya saja di Kelurahan Parupuak Tabing, perahu telah

terbengkalai selama setahun lebih dan ini membuat perahu menjadi tidak layak pakai dikarenakan oleh kayunya tersebut.

Sumber Daya Manusia yang tidak memadai. Hal ini bisa dilihat dari hasil perahu yang kurang bagus. Ini dikarenakan pembuatan perahu bukan berasal dari ahli yang bisa membuat Perahu Payang.

Perahu harus dimodifikasi dahulu oleh nelayan sebelum digunakan sehingga menambah beban bagi nelayan. Oleh sebab itu nelayan harus berpikir dua kali untuk benar-benar bisa memakai bantuan tersebut karena dana yang terbatas yang dimiliki oleh nelayan sehingga beberapa bantuan perahu yang telah diberikan nelayan tidak terpakai. Jika nelayan tidak menginginkannya, akan dikembalikan ke Dinas Perikanan kembali. Tapi sampai kini, perahu itu tidak dikembalikan juga.

Sementara itu menurut Nugroho (2012:107) ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Berdasarkan kebijakan pemberian Perahu Payang oleh Dinas Perikanan Kota Padang ditinjau dari indikator efektivitas implentasi kebijakan salah satunya yaitu: Tepat Kebijakan. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sedangkan pemberian bantuan Perahu Payang hal tersebut tidak memecahkan persoalan nelayan. Berdasarkan kenyataannya perahu tersebut tidak bisa digunakan dan terbengkalai yang mana tujuan dari kebijakan bantuan program ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nelayan untuk menangkap ikan

dengan perahu yang lebih bagus dan memadai. Namun ternyata tidak malah menambah persoalan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian bantuan Perahu Payang oleh Dinas Perikanan adalah meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan, meningkatkan mutu hasil tangkapan, dan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat nelayan. Sementara itu Belum tercapainya tujuan dari program bantuan yang diberikan Karena perahu tersebut belum digunakan dan tidak terpakai oleh nelayan.

Berangkat dari masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Efektivitas Kebijakan Bantuan Perahu Payang Untuk Para Nelayan Oleh Dinas Perikanan Kota Padang.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang efektifnya pemberian bantuan perahu yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Padang kepada para nelayan berdasarkan teori Nugroho (2012:107) ada “empat tepat” yang perlu, yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan.
2. Pengawasan dan pendampingan yang kurang dalam pembuatan dan pemberian bantuan perahu.
3. Perahu yang diminta tidak sesuai dengan perahu yang diberikan.
4. Perahu harus dimodifikasi dahulu oleh nelayan sebelum digunakan sehingga menambah beban bagi nelayan.

5. Belum tercapainya tujuan dari program bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang efektifnya pemberian bantuan perahu yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Padang kepada para nelayan berdasarkan teori Nugroho (2012:107) ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan.
2. Pengawasan dan pendampingan yang kurang dalam pembuatan dan pemberian bantuan perahu.
3. Belum tercapainya tujuan dari program bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan bantuan Perahu Payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan Perahu Payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan bantuan Perahu Payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan Perahu Payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan bidang keilmuan pada jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) terutama terkait dengan mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- a. Dinas Perikanan, sebagai masukan dan evaluasi terhadap kebijakan atau program yang diluncurkan.
- b. Bagi nelayan, menjadi masukan sebagai acuan dalam penerimaan bantuan dari dinas yang terkait.
- c. Bagi penulis sebagai persyaratan skripsi untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di jurusan Ilmu Administrasi Negara.